

Pers alternatif : studi kasus Aliansi Jurnalis Independen 1994-1998 =
Alternative press : case studies Alliance of Independent Journalists
1994-1998

Riska Anneli Septovia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20330746&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang terciptanya gerakan perlawanan terhadap penyumbatan arus informasi, yakni dengan menerbitkan pers alternatif yang lahir sebagai dampak langsung dari pembredelan pers 1994 di bawah rezim Orde Baru. Adapun, terbitan pers alternatif yang diangkat dalam penelitian ini adalah Suara Independen dan Xpos yang dikelola oleh Aliansi Jurnalis Independen. Substansi isi Suara Independen dan Xpos menjadikan pemerintah Orde Baru sebagai sasaran kritik utama mereka dengan mencoba mengangkat isu-isu sensitif melalui penyajian yang berbeda dengan terbitan pers arus utama. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberanian terbitan pers alternatif untuk membuka indikasi sesuatu yang buruk bagi upaya perwujudan good governance ini turut memiliki peran bersama-sama gerakan reformasi lainnya dalam melemahkan legitimasi pemerintah Orde Baru di tahun 1998.

.....This thesis discusses the creation of the resistance movement against the blockage of information flow, there is the alternative press publishing which born as a direct result of the banning press in 1994 under the New Order regime. Meanwhile, the objects of alternative press publications in this study are Suara Independen and Xpos that managed by the Alliance of Independent Journalists. The substance and context of the Suara Independen and Xpos focus on New Order regime as their main target of criticism by trying to blow up the sensitive issues with their own way through the presentation of different from the other mainstream news publications. The results showed that the alternative press publications' courage to open an indication of something that is bad for the realization of good governance basically claiming that they have their own role along with the other reform movements on undermining the legitimacy of the New Order regime in 1998.